ANALISIS KOMPARATIF KAPASITAS FISKAL DANA BAGI HASIL MINERAL BATU BARA ANTARA KABUPATEN TABALONG DAN BALANGAN

Gusti Alya
NPP. 33.0710
Program Studi Keuangan Publik
Email: alyaps792003@gmail.com

Pembimbing Skripsi: Elvira Mulya Nalien, S.IP., M.Si
Email: elviramnalien@ipdn.ac.id

ABSTRACT

Problem Statement (Research Gap) *:This study examines fiscal capacity disparities in Tabalong and Balangan Regencies, which are driven by fluctuations in Revenue Sharing Funds (Dana Bagi Hasil/DBH) from Non-Metallic Minerals and Coal, as well as the high degree of regional fiscal dependence on central government transfers.* ***Purpose****: The objective of this study is to analyze the fiscal capacity of Tabalong and Balangan Regencies within the context of coal revenue-sharing funds.* ***Method:*** *This research employs a descriptive quantitative approach to calculate fiscal indicators and a descriptive qualitative approach to gain a deeper understanding of the phenomena observed in the field. The analysis utilizes the Vertical Fiscal Imbalance (VFI) model based on the Coefficient of Variation Index (CVI) to measure vertical dependency, and the Horizontal Fiscal Imbalance (HFI) model using the Williamson Index to assess interregional disparities.* ***Result****: The VFI findings indicate that Balangan Regency consistently exhibits a higher level of vertical fiscal imbalance and dependence on central government transfers due to the substantial share of coal royalties that has not been matched by the optimization of locally generated revenue (PAD). In contrast, Tabalong Regency demonstrates a relatively more stable fiscal structure, supported by the growth of its tertiary sector. Meanwhile, the HFI analysis using the Williamson Index produces values that are very close to zero, indicating that horizontal disparities between the two regions are minimal and relatively equal, largely due to the similarity of their extractive economic bases. Several determinant factors contribute to fluctuations in fiscal capacity, including transfer distribution regulations based on actual realization under the Regional Financial Relations Law (UU HKPD), shifts in mining footprints, fluctuations in global coal prices, and mechanisms for settling underpayments or overpayments by the central government.*

Keywords: Coal; Fiscal Capacity; Revenue Sharing Funds (DBH).

ABSTRAK

Permasalahan (Kesenjangan Penelitian/Research Gap): Penelitian ini mengkaji ketimpangan kapasitas fiskal di Kabupaten Tabalong dan Balangan yang dipicu oleh fluktuasi Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Bukan Logam dan Batubara serta tingginya ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pemerintah pusat. **Tujuan**:Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Kapasitas Fiskal Kabupaten Tabalong dan Balangan berdasarkan konteks Dana Bagi Hasil Mineral Batubara. **Metode**: Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kuantitatif deskriptif untuk menghitung indikator fiskal dan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperdalam pemahaman terhadap fenomena di lapangan. Analisis dilakukan melalui model *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) berbasis *Coefficient of Variation Index* (CVI) untuk mengukur ketergantungan vertikal, serta model *Horizontal Fiscal Imbalance* (HFI) menggunakan Indeks Williamson untuk mengukur ketimpangan antarwilayah. **Hasil**: Temuan VFI menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan secara konsisten memiliki tingkat ketimpangan vertikal dan ketergantungan transfer pusat yang lebih tinggi akibat besarnya porsi royalti batubara yang belum diimbangi oleh optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mandiri, sedangkan Kabupaten Tabalong menunjukkan struktur fiskal yang relatif lebih stabil yang didorong oleh pertumbuhan sektor tersiernya. Sebaliknya, hasil analisis HFI melalui Indeks Williamson menghasilkan angka yang sangat mendekati nol, menunjukkan bahwa tingkat kesenjangan atau disparitas horizontal antara kedua wilayah berkategori sangat rendah atau merata akibat homogenitas basis ekonomi ekstraktif yang identik. Faktor determinan yang memicu fluktuasi kapasitas fiskal ini mencakup regulasi penyaluran berbasis realisasi berdasarkan UU HKPD, pergeseran tapak tambang (*mining footprint*), pergerakan harga batubara global, serta mekanisme penyelesaian kurang bayar atau lebih bayar oleh pemerintah pusat.

Kata Kunci: Batubara; Kapasitas Fiskal; Dana Bagi Hasil (DBH).

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan Kapasitas fiskal daerah merupakan salah satu faktor mendasar yang mengakibatkan rendah atau tingginya kualitas kemandirian keuangan suatu negara dalam era desentralisasi. Secara umum, kapasitas fiskal ini ditandai dengan kemampuan daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan potensialnya. Berdasarkan fenomena fluktuasi ekonomi pasca-pandemi dan dinamika regulasi hubungan keuangan pusat-daerah, peringkat kemandirian fiskal sebagian besar kabupaten/kota di Indonesia masih berada pada kategori belum mandiri dan sangat bergantung pada dana transfer. Kondisi tersebut menampakkan bahwa struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di tingkat lokal masih sangat rentan terhadap guncangan kebijakan fiskal nasional. Indonesia sebagai negara kepulauan yang kaya akan sumber daya alam, menempatkan sektor pertambangan sebagai salah satu aset besar dalam proses penopang pembiayaan pembangunan bangsa ke depan. Sektor ekstraktif, khususnya sub-sektor mineral bukan logam dan batubara, menjadi kontributor utama penyumbang Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang nantinya dibagihasilkan kembali ke daerah melalui skema Dana Bagi Hasil (DBH). Peneliti sebelumnya juga menyatakan bahwa untuk mendukung otonomi daerah, pemerintah menstranfer dana perimbangan, dari ketiga dana tersebut, peneliti merasa yang paling penting adalah Dana Bagi Hasil. Dan Bagi Hasil (DBH) memiliki peran yang sangat strategis sebagai penyeimbangan fiskal antara pusat dan daerah (Agustina, 2022).

Pengelolaan dana transfer ini menjadi tonggak terdepan dan tanggung jawab besar bagi pemerintah daerah dalam memajukan perekonomian masyarakat yang dimulai dari wilayah penghasil itu masing-masing. Mengelola Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) yang efektif menjadikan pemerintah pusat sebagai salah satu pemegang peran dalam usaha menciptakan sistem keuangan yang adil dan efisien, di mana alokasi dana tidak hanya mempertimbangkan kebutuhan fiskal daerah tetapi juga kinerja dan akuntabilitas pengelolaan dari pusat (Nalien, 2020). Tingkat kapasitas fiskal suatu daerah merupakan wujud dari keberhasilan tata kelola keuangan yang diselenggarakan. Optimalisasi fiskal merupakan upaya pembangunan daerah secara berkelanjutan. Membangun fiskal daerah berarti membangun fondasi kemandirian untuk membiayai pelayanan publik tanpa ketergantungan ekstrem. Kemajuan dan keberhasilan pembangunan infrastruktur serta aspek kesejahteraan sosial terlahir dari kapasitas fiskal daerah yang sehat dan terencana, sehingga terus mengalami perkembangan ke arah yang lebih baik. Provinsi Kalimantan Selatan memiliki wilayah potensial tambang yang tersebar di beberapa daerah, termasuk Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Dalam rangka meningkatkan ruang fiskal daerah melalui pemanfaatan sewa sumber daya alam, pembagian DBH Mineral Batu Bara menjadi instrumen krusial yang diatur secara berkala oleh pemerintah pusat. Program alokasi anggaran ini terlaksana berkat adanya pembagian porsi antara wilayah penghasil dan wilayah pemerataan berdasarkan formula regulasi nasional (seperti UU HKPD) terutama terkait perihal realisasi volume produksi dan harga batubara dunia. Dengan memanfaatkan hak

bagi hasil atas eksploitasi di sekitar pemukiman warga, masing-masing kabupaten dipacu untuk menyulap dana transfer tersebut menjadi program pembangunan dan investasi daerah. Kapasitas fiskal pada hakikatnya merupakan kemampuan keuangan suatu daerah yang diukur melalui pendapatan asli daerah dikurangi belanja wajib, serta kemampuan untuk beradaptasi terhadap perubahan dana transfer secara terus menerus. Secara detail, makna kapasitas fiskal juga mencakup aspek *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) dan *Horizontal Fiscal Imbalance* (HFI). Tujuannya adalah untuk melihat sejauh mana keseimbangan vertikal hubungan pusat-daerah serta pemerataan horizontal antardaerah penghasil yang memiliki karakteristik basis ekonomi ekstraktif yang serupa. Oleh karena itu, analisis komparatif ini tidak hanya terbatas pada angka realisasi nominal, melainkan melalui pemanfaatan metode kalkulasi indeks seperti *Coefficient of Variation Index* (CVI) dan Indeks Williamson secara mendalam. Realisasi DBH batubara telah berjalan secara fluktuatif selama beberapa tahun anggaran terakhir di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Fluktuasi ini diharapkan mampu dipetakan dengan baik, tidak hanya pada pencatatan angka di Laporan Realisasi Anggaran (LRA) saja, tetapi termasuk dalam mengidentifikasi faktor determinan seperti pergeseran wilayah operasional tambang (*mining footprint*) hingga kebijakan kurang/lebih bayar dari pusat. Alasan dipilihnya kedua kabupaten ini dalam analisis komparatif yakni agar dapat membangun model kemandirian fiskal pada tingkat lokal yang berdampak langsung pada struktur APBD, sehingga dampaknya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat setempat termasuk pemerintah daerah dalam mewujudkan stabilitas fiskal jangka panjang.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil

Penulis berfokus pada permasalahan tingginya tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap dana transfer pusat serta kerentanan struktur APBD akibat fluktuasi realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Bukan Logam dan Batubara di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Sementara itu, penguatan sektor fiskal dan optimalisasi pendapatan daerah seharusnya menjadi salah satu instrumen anggaran unggulan pemerintah daerah dalam rangka mendanai pembangunan infrastruktur, menggerakkan roda ekonomi, dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara keseluruhan. Kesenjangan (*gap*) antara harapan regulasi desentralisasi fiskal yang mengamanatkan kemandirian daerah dengan realitas di lapangan yang masih sangat dependen terhadap komoditas batu bara inilah yang menjadi latar belakang utama penelitian ini. Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan kapasitas fiskal dalam mengawal keberlanjutan pembiayaan pembangunan di kedua kabupaten ini. Faktor dinamika regulasi dan operasional merupakan salah satunya. Cukup banyak ketidakpastian yang dihadapi daerah dalam memprediksi porsi pembagian DBH dari pemerintah pusat dengan berbagai sebab, salah satunya adalah pemberlakuan sistem *actual-based revenue* pasca-lahirnya UU HKPD, di mana penyaluran transfer sangat bergantung pada realisasi penerimaan riil saat ini dan fluktuasi harga komoditas global, bukan lagi berdasarkan asumsi kuota APBN semata. Selain itu, adanya pergeseran wilayah operasional tambang (*mining footprint*) secara geologis menimbulkan ketimpangan pencatatan produksi hulu, yang memicu protes sosiopolitik karena daerah penyangga logistik harus menanggung eksternalitas

negatif lingkungan dan kerusakan infrastruktur yang besar namun menerima porsi DBH yang tidak sebanding.

1.3 Urgensi Penelitian

Penelitian ini penting dilakukan sekarang mengingat perlunya memberikan gambaran empiris mengenai kapasitas fiskal dan pola ketergantungan daerah terhadap Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Batu Bara antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan sebagai dasar perumusan strategi oleh pemerintah daerah setempat selanjutnya dalam peningkatan kemandirian keuangan dan stabilitas APBD di tengah berbagai tantangan ekonomi-regulasi seperti pemberlakuan sistem *actual revenue* UU HKPD, pergeseran wilayah operasional tambang (*mining footprint*), fluktuasi harga komoditas global, dan ancaman nyata fenomena *resource curse* (kutukan sumber daya) jangka panjang. Apabila penelitian ini tidak dilaksanakan, maka pemerintah daerah dan pemangku kebijakan di Kabupaten Tabalong maupun Kabupaten Balangan akan kekurangan dasar empiris yang kuat dalam memahami pola serta tingkat ketidakseimbangan fiskal secara faktual. Akibatnya, perumusan strategi diversifikasi ekonomi, penentuan target Pendapatan Asli Daerah (PAD), serta kebijakan alokasi belanja daerah berisiko tidak tepat sasaran, kurang efektif, dan tidak siap dalam mengantisipasi guncangan atau penurunan drastis dana transfer pusat di masa mendatang. Secara keilmuan, ketiadaan penelitian ini juga akan menghambat pemutakhiran literatur mengenai implementasi model *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) dan Indeks Williamson dalam memetakan anomali daerah kaya sumber daya pasca-reformasi regulasi hubungan keuangan pusat-daerah di Indonesia.

1.4 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan tinjauan pustaka yang relevan, kajian mengenai kapasitas fiskal, ketidakseimbangan fiskal, dan Dana Bagi Hasil (DBH) telah banyak dieksplorasi secara bertahap oleh berbagai peneliti terdahulu. Penelitian pertama mengungkapkan bahwa disparitas kapasitas fiskal antarprovinsi cenderung meningkat pada era desentralisasi, namun keberadaan Dana Alokasi Umum (DAU) terbukti mampu mengurangi kesenjangan tersebut (Ariani, 2010). Fenomena ini mengindikasikan bahwa intervensi dana transfer pusat memang memiliki peran strategis dalam menjaga stabilitas keuangan di tingkat daerah. Selanjutnya, penelitian kedua oleh Mumbunan et al (2012) menjelaskan bahwa transfer fiskal berbasis lingkungan memiliki potensi besar untuk memperbaiki pemerataan fiskal, meskipun ketimpangan antardaerah masih tetap ditemukan di lapangan. Penelitian ketiga memperkuat temuan sebelumnya dengan membuktikan bahwa ketidakseimbangan fiskal, baik secara vertikal maupun horizontal, masih terjadi pada tingkat kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur dan menunjukkan tren yang cenderung meningkat dari tahun ke tahun (Lazuardi, 2013). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa daerah dengan basis ekonomi sekunder dan tersier yang belum matang akan selalu mengalami kendala kemandirian. Lebih lanjut, penelitian keempat oleh menemukan adanya perbedaan tingkat kemandirian fiskal yang cukup signifikan di lima wilayah adat Papua, yang menegaskan bahwa kemampuan fiskal

daerah sangat dipengaruhi oleh karakteristik ekonomi dan sumber penerimaan spesifik masing-masing wilayah (Indahyani & Marbun, 2020).

Sementara itu, penelitian kelima oleh Ahmad (2023) juga menemukan adanya perbedaan kapasitas fiskal yang cukup mencolok di 34 provinsi Indonesia, di mana sebagian besar provinsi teridentifikasi masih berada pada kategori kapasitas fiskal yang rendah. Terakhir, penelitian keenam oleh Hidayat et al (2024) menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil sumber daya alam (DBH SDA) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga menjadikannya instrumen krusial dalam mendukung pembangunan wilayah. Akan tetapi, efektivitas DBH ini sering kali terhambat oleh volatilitas harga komoditas global yang sulit diprediksi oleh pemerintah daerah. Secara umum, seluruh penelitian terdahulu tersebut memiliki kesamaan dalam membahas variabel kapasitas fiskal, transfer dana pusat, dan ketidakseimbangan fiskal daerah. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, atau menggunakan pendekatan agregat yang bersifat makro. Oleh karena itu, penelitian ini memiliki kebaruan (*research novelty*) karena secara khusus dan mikro menganalisis kapasitas fiskal dalam konteks Dana Bagi Hasil Mineral Batubara pada dua kabupaten bertetangga penghasil batubara, yaitu Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Selain itu, kebaruan metodologis dalam penelitian ini terletak pada integrasi analisis *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) (Bird & Tarasov, 2004), serta *Horizontal Fiscal Imbalance* (HFI) melalui Indeks untuk mengidentifikasi tingkat ketidakseimbangan fiskal daerah beserta faktor-faktor determinan yang memengaruhinya (Williamson, 1965). Melalui fokus komparatif pada level mikro kabupaten ini, dinamika regulasi terbaru seperti implementasi UU HKPD dapat dipotret secara lebih kontekstual dan mendalam. Dengan demikian, luaran dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih aplikatif bagi penguatan kemandirian fiskal daerah penghasil komoditas ekstraktif.

1.5 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Kebaruan ilmiah penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) menurut Bird dan Tarasov, dimana *High vertical fiscal imbalances significantly increase regional fiscal dependence and can distort local spending behavior, as local governments rely more on central transfers than on their own revenue generation* (Eyraud & Lusinyan, 2013), artinya ketidakseimbangan fiskal vertikal yang tinggi secara signifikan meningkatkan ketergantungan fiskal daerah dan dapat mendistorsi perilaku belanja daerah, karena pemerintah daerah lebih mengandalkan transfer pusat dibandingkan dengan menghasilkan pendapatan mereka sendir serta *Horizontal Fiscal Imbalance (HFI)* menggunakan Indeks Williamson untuk menganalisis kapasitas fiskal daerah dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Batu Bara. Berbeda dengan penelitian Ahmad (2023) yang membandingkan kapasitas fiskal pada tingkat provinsi secara nasional dan penelitian Hidayat et al (2024) yang berfokus pada pengaruh DBH sumber daya alam terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, penelitian ini secara khusus mengkaji dinamika ketidakseimbangan fiskal pada

tingkat kabupaten dengan karakteristik ekonomi yang relatif homogen, yaitu Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Selain itu, penelitian Ariani (2010) dan Mumbunan et al (2012) lebih menekankan disparitas fiskal dan transfer fiskal pada skala yang luas, sedangkan penelitian ini mengaitkan secara langsung fluktuasi DBH Mineral Batu Bara dengan kapasitas fiskal daerah penghasil. Dengan demikian, penelitian ini menawarkan perspektif baru mengenai hubungan antara penerimaan DBH Minerba, ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal, serta faktor-faktor yang memengaruhi kapasitas fiskal daerah berbasis sumber daya alam (Ahmad, 2023; Ariani, 2010; Hidayat et al., 2024; Mumbunan et al., 2012).

1.6 Tujuan

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis secara komparatif kapasitas fiskal dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Batu Bara antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang didukung oleh analisis kualitatif. Pendekatan kuantitatif digunakan sebagai tahapan utama untuk menganalisis kapasitas fiskal Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Batu Bara. Pendekatan ini dipilih karena mampu memberikan gambaran yang objektif dan terukur mengenai kondisi ketidakseimbangan fiskal melalui pemanfaatan data keuangan daerah dan indikator ekonomi yang relevan. Analisis kuantitatif dilakukan dengan menggunakan model *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI) menurut Bird & Tarasov (2004) untuk mengukur ketidakseimbangan fiskal vertikal, serta Indeks Williamson untuk mengukur ketidakseimbangan fiskal horizontal. Penggunaan kedua model tersebut dinilai sesuai dengan tujuan penelitian karena dapat menunjukkan tingkat kapasitas fiskal dan kesenjangan fiskal yang terjadi antara kedua daerah penghasil batu bara. Setelah diperoleh hasil perhitungan kuantitatif, penelitian dilanjutkan dengan analisis kualitatif yang bertujuan untuk memperkuat interpretasi terhadap temuan statistik serta menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi perbedaan kapasitas fiskal antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Pendekatan ini digunakan agar hasil penelitian tidak hanya menggambarkan besaran angka ketidakseimbangan fiskal, tetapi juga mampu menjelaskan kondisi empiris yang melatarbelakangi fenomena tersebut. Penelitian dilaksanakan di Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, Provinsi Kalimantan Selatan.

Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan bahwa kedua daerah merupakan kabupaten penghasil batu bara yang memiliki keterkaitan dengan aktivitas pertambangan PT Adaro Indonesia serta sama-sama memperoleh penerimaan Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara. Selain itu, kedua daerah memiliki karakteristik ekonomi yang relatif serupa sehingga relevan untuk dianalisis secara komparatif. Penelitian dilaksanakan selama kurang lebih enam bulan, yaitu sejak Januari hingga Juni 2026 yang meliputi tahap persiapan, pengumpulan data, pengolahan data, analisis, hingga penyusunan laporan penelitian. Data yang

digunakan terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi terstruktur dengan informan yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling. Teknik ini dipilih karena memungkinkan peneliti memperoleh informasi dari pihak yang memiliki pengetahuan dan keterlibatan langsung terhadap pengelolaan keuangan daerah. Informan kunci dalam penelitian ini adalah pejabat pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan karena memiliki kewenangan serta pemahaman yang mendalam mengenai pengelolaan pendapatan daerah, transfer fiskal, dan penerimaan Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara. Sementara itu, data sekunder diperoleh melalui dokumentasi berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA), data Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), data jumlah penduduk, serta berbagai dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan penelitian. Analisis data dilakukan dalam dua tahapan. Tahap pertama menggunakan analisis kuantitatif deskriptif melalui perhitungan *Coefficient of Vertical Imbalance* (CVI) dan Indeks Williamson untuk mengukur tingkat ketidakseimbangan fiskal vertikal dan horizontal. Tahap kedua menggunakan analisis kualitatif melalui proses reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi. Melalui tahapan tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan gambaran yang komprehensif mengenai kapasitas fiskal daerah dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Analisis Kapasitas Fiskal Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan

Kapasitas fiskal merupakan salah satu indikator yang digunakan untuk mengukur kemampuan suatu daerah dalam membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik berdasarkan sumber-sumber pendapatan yang dimiliki. Dalam konteks desentralisasi fiskal, kapasitas fiskal menjadi aspek penting karena menunjukkan tingkat kemampuan daerah dalam memenuhi kebutuhan belanjanya tanpa bergantung secara berlebihan pada transfer dari pemerintah pusat. Bagi daerah yang memiliki sumber daya alam, salah satu komponen penerimaan yang berkontribusi terhadap kapasitas fiskal adalah Dana Bagi Hasil (DBH) yang berasal dari pengelolaan sumber daya alam tersebut. Oleh karena itu, perbedaan penerimaan Dana Bagi Hasil dapat memengaruhi kondisi fiskal suatu daerah dan berpotensi menimbulkan ketidakseimbangan fiskal baik secara horizontal maupun vertikal. Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan merupakan dua daerah penghasil batu bara di Provinsi Kalimantan Selatan yang memperoleh penerimaan Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara dari aktivitas pertambangan yang berlangsung di wilayahnya.

Kedua daerah tersebut memiliki karakteristik yang relatif serupa karena sama-sama bergantung pada sektor pertambangan sebagai salah satu sektor unggulan daerah. Kegiatan pertambangan sangat bergantung pada harga Batubara, diperkuat bahwa *the high volatility of global commodity prices creates unpredictable fluctuations in regional mineral revenues, creating a significant challenge for local governments to maintain steady infrastructure funding* (Bhattacharyya & Hodler, 2014), kutipan tersebut memang membenarkan bahwa harga Batubara memengaruhi fluktuasi yang bahkan tidak dapat diprediksi. Selain itu, aktivitas pertambangan yang dilakukan oleh perusahaan yang sama, yaitu PT Adaro Indonesia beserta anak perusahaannya, menjadikan kedua daerah memiliki keterkaitan yang kuat dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara. Meskipun demikian, data penerimaan daerah menunjukkan adanya perbedaan dalam realisasi Dana Bagi Hasil yang diterima masing-masing kabupaten sehingga menarik untuk dianalisis lebih lanjut melalui pendekatan kapasitas fiskal. Dalam penelitian ini, analisis kapasitas fiskal dilakukan menggunakan dua pendekatan, yaitu *Horizontal Fiscal Imbalance* (HFI) dan *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI). Pendekatan *Horizontal Fiscal Imbalance* digunakan untuk mengukur tingkat ketidakseimbangan fiskal antar daerah melalui Indeks Williamson dengan memanfaatkan indikator Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita dan jumlah penduduk. Pendekatan ini digunakan karena mampu menggambarkan tingkat kesenjangan ekonomi yang terjadi antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan sebagai daerah yang memiliki basis ekonomi yang relatif sama. Sementara itu, *Vertical Fiscal Imbalance* digunakan untuk mengukur hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah melalui perhitungan *Coefficient of Vertical Imbalance* (CVI) berdasarkan komponen pendapatan daerah, transfer fiskal, dan belanja daerah. Kedua pendekatan tersebut dipilih karena dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas fiskal daerah, baik dari sisi kemampuan ekonomi antarwilayah maupun dari sisi ketergantungan terhadap transfer fiskal pemerintah pusat.

3.1.1 Analisis Horizontal Fiscal Imbalance (HFI)

No	Tahun	Indeks Williamson	Kategori
1	2020	0,078	**Sangat Merata**
2	2021	0,091	**Sangat Merata**
3	2022	0,138	**Sangat Merata**
4	2023	0,130	**Sangat Merata**
5	2024	0,125	**Sangat Merata**
6	2025	0,127	**Sangat Merata**

Hasil perhitungan *Horizontal Fiscal Imbalance* menunjukkan tingkat ketidakseimbangan fiskal antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan selama periode penelitian. Perhitungan dilakukan menggunakan Indeks Williamson yang mengukur disparitas berdasarkan perbedaan tingkat pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Indeks Williamson dipilih karena merupakan salah satu instrumen yang banyak digunakan dalam mengukur kesenjangan pembangunan antarwilayah dan mampu memberikan gambaran mengenai tingkat pemerataan kapasitas ekonomi yang dimiliki oleh suatu daerah. Berdasarkan hasil perhitungan yang telah dilakukan, nilai Indeks Williamson menunjukkan adanya tingkat ketidakseimbangan fiskal antara kedua daerah. Meskipun Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan sama-sama memperoleh manfaat ekonomi dari sektor pertambangan batu bara, hasil perhitungan memperlihatkan bahwa kapasitas ekonomi yang terbentuk tidak sepenuhnya identik. namun sesuai nilai indikator, maka masuk kategori yang sangat merata. *Using spatial disparity indicators such as the Williamson Index reveals that regional economic homogeneity plays a crucial role in lowering horizontal fiscal imbalances within neighboring jurisdictions* (Lessmann, 2012), dimana kutipan tersebut menyuratkan Penggunaan indikator disparitas spasial seperti Indeks Williamson menunjukkan bahwa homogenitas ekonomi wilayah memainkan peran krusial dalam menurunkan ketidakseimbangan fiskal horizontal pada yurisdiksi yang saling bertetangga. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa penerimaan daerah tidak hanya dipengaruhi oleh keberadaan sumber daya alam, tetapi juga dipengaruhi oleh struktur ekonomi daerah, jumlah penduduk, serta kemampuan daerah dalam mengoptimalkan potensi ekonomi yang dimiliki. *The distribution of natural resource revenue-sharing funds (DBH) in Indonesia tends to mitigate horizontal disparity among identical resource-producing regions, yet it exacerbates the vertical dependency on central government distribution mechanisms* (Hidayat et al., 2024). Kutipan tersebut telah menyampaikan bahwa Penyaluran dana bagi hasil sumber daya alam (DBH) di Indonesia cenderung memitigasi disparitas

horizontal di antara wilayah-wilayah penghasil komoditas sejenis, namun hal

Kabupaten/Periode	CVI I	CVI II	CVI III	Total Setoran Minerba (per perusahaan)
Tabalong 2020	0,352	0,352	-0,174	Rp1.191.283.227.287
Balangan 2020	0,338	0,338	-0,095	Rp972.386.563.595
Tabalong 2021	0,274	0,274	-0,087	Rp3.089.867.075.659
Balangan 2021	0,289	0,289	-0,123	Rp3.054.911.550.924
Tabalong 2022	0,503	0,503	0,051	Rp4.545.490.669.420
Balangan 2022	0,667	0,667	0,297	Rp10.868.738.415.477
Tabalong 2023	0,576	0,576	0,27	Rp8.731.592.893.084
Balangan 2023	0,859	0,859	0,475	Rp11.573.487.347.445
Tabalong 2024	0,66	0,66	0,379	Rp6.642.546.706.065
Balangan 2024	0,809	0,809	0,693	Rp8.018.105.620.904
Tabalong 2025	0,639	0,639	0,329	Rp1.418.796.649.480
Balangan 2025	0,727	0,727	0,513	Rp3.309.806.967.656

tersebut memperparah ketergantungan vertikal terhadap mekanisme distribusi pemerintah pusat.

3.1.2 Analisis *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI)

Selain mengukur ketidakseimbangan fiskal secara horizontal, penelitian ini juga menganalisis ketidakseimbangan fiskal vertikal menggunakan pendekatan Bird dan Tarasov melalui perhitungan *Coefficient of Vertical Imbalance* (CVI). Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap transfer fiskal dari pemerintah pusat dalam membiayai kebutuhan belanjanya. Dalam konteks penelitian ini, Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara menjadi salah satu komponen penting yang memengaruhi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan daerah. Hasil perhitungan CVI menunjukkan tingkat ketergantungan fiskal yang berbeda antara Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan. Nilai yang diperoleh menggambarkan bahwa transfer fiskal masih memiliki kontribusi yang signifikan terhadap struktur pendapatan kedua daerah. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun kedua kabupaten memiliki potensi sumber daya alam yang besar, pembiayaan pembangunan daerah masih dipengaruhi oleh mekanisme transfer fiskal yang berasal dari pemerintah pusat. Berkaitan dengan penelitian sebelumnya terhadap Kabupaten Bandung, diperoleh bahwa Kabupaten Bandung Barat tergolong sebagai daerah dengan ketergantungan keuangandaerah yang sangat tinggi sehingga masih sangat membutuhkan bantuan dana transfer dari pemerintah pusat. Hal tersebut diakibatkan oleh perolehan Pendapatan Asli Daerah serta Lain-lain Pendapatan yang Sah belum mampu untuk menutupi segala kebutuhan dan juga belanja

daerahnya (Fahriza & Riswati, 2023), yang mana dalam penelitian ini dana transfer yang akan dianalisis adalah DBH Mineral Batubara. Dijeskan lebih lanjut bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi kemandirian keuangan daerah Kota Pekanbaru merupakan indikator yang mencerminkan ketergantung Kota Pekanbaru pada sumber dana yang berasal dari pendapatan transfer seperti Dana Alokasi Umum, DBH, dan Transfer Lainnya (Sinurat et al., 2023).

Dalam perspektif Bird dan Tarasov, semakin tinggi nilai CVI maka semakin besar tingkat ketergantungan fiskal daerah terhadap pemerintah pusat. Sebaliknya, semakin rendah nilai CVI menunjukkan semakin kuat kemampuan daerah dalam membiayai kebutuhannya melalui sumber pendapatan yang dimiliki secara mandiri. Oleh karena itu, hasil perhitungan VFI tidak hanya menunjukkan kondisi kapasitas fiskal daerah, tetapi juga memberikan gambaran mengenai tingkat kemandirian fiskal yang dimiliki oleh masing-masing daerah penghasil batu bara. Ketidakseimbangan antara laju pertumbuhan belanja daerah dan optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sering kali memaksa pemerintah daerah berada pada tingkat kemandirian fiskal yang rendah dan terus bergantung pada dana transfer pusat (Runjung et al., 2022). *Extractive resource abundance often leads to a localized resource curse where regional governments experience severe fiscal vulnerability due to a lack of economic diversification and heavy reliance on resource-based revenues* (Feng & Li, 2024), dimana umber daya ekstraktif sering kali memicu kutukan sumber daya (*resource curse*) lokal, di mana pemerintah daerah mengalami kerentanan fiskal yang parah akibat kurangnya diversifikasi ekonomi dan besarnya ketergantungan pada pendapatan berbasis sumber daya alam.

Secara keseluruhan, hasil analisis *Horizontal Fiscal Imbalance* dan *Vertical Fiscal Imbalance menunjukkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan memiliki karakteristik* yang berbeda meskipun keduanya merupakan daerah penghasil batu bara yang memperoleh Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara. Perbedaan tersebut tercermin dari tingkat ketidakseimbangan fiskal yang terbentuk baik secara horizontal maupun vertikal. Temuan ini menunjukkan bahwa Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara memiliki peran yang penting dalam membentuk kapasitas fiskal daerah serta menjadi salah satu instrumen yang memengaruhi hubungan fiskal antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam kerangka desentralisasi fiskal. Berkaitan dengan pusat, disampaikan bahwa upaya peningkatan kemandirian keuangan daerah memerlukan reformasi tata kelola pendapatan lokal agar hubungan keuangan antara pusat dan daerah dapat bergeser dari pola hubungan yang konsultatif menuju pola yang lebih partisipatif (Sinurat et al., 2023).

IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa kapasitas fiskal Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil (DBH) Mineral Batu Bara memiliki perbedaan yang tercermin melalui hasil perhitungan *Horizontal Fiscal Imbalance* (HFI) dan *Vertical Fiscal Imbalance* (VFI). Berdasarkan Indeks Williamson, tingkat ketidakseimbangan fiskal horizontal antara kedua daerah tergolong rendah, yang menunjukkan bahwa kapasitas ekonomi keduanya relatif seimbang. Sementara itu, hasil perhitungan Coefficient of Vertical Imbalance (CVI) menunjukkan bahwa Kabupaten Balangan memiliki tingkat ketergantungan terhadap transfer fiskal yang lebih tinggi dibandingkan Kabupaten Tabalong. Dengan demikian, kapasitas fiskal Kabupaten Tabalong relatif lebih baik dibandingkan Kabupaten Balangan dalam konteks penerimaan Dana Bagi Hasil Mineral Batu Bara selama periode penelitian.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan. Pertama, penelitian hanya berfokus pada dua daerah penghasil batu bara, yaitu Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan, sehingga hasil penelitian belum dapat digeneralisasikan untuk seluruh daerah penghasil sumber daya alam di Indonesia. Kedua, analisis kapasitas fiskal dibatasi pada periode data tahun 2020–2025.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan studi pada lebih banyak daerah penghasil sumber daya alam serta menggunakan periode pengamatan yang lebih panjang agar dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai kapasitas fiskal daerah.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Tabalong dan Kabupaten Balangan serta Bapenda Kabupaten Tabalpng beserta seluruh informan yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada dosen pembimbing, keluarga, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mendukung pelaksanaan penelitian hingga penyusunan artikel ini dapat diselesaikan dengan baik.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Agustina, I.(2022). Kebijakan Dana Bagi Hasil (DBH) Berdasarkan Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, *9*(1), 51–60. https://ejournal.ipdn.ac.id/JEKP/article/view/2787

Ahmad, D. A. (2023). *Analisis Kapasitas Fiskal 34 Provinsi Di Indonesia Tahun Periode 2017-2021*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/74876

Ariani, K. R. (2010). *Pengaruh Belanja Modal Dan Dana Alokasi Umum terhadap Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Tax Effort (Studi Kasus Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Wilayah Eks Karesidenan Surakarta)*. Universitas Sebelas Maret. https://www.scribd.com/document/613458676/Kurnia-Rina-Ariani

Bhattacharyya, S., & Hodler, R. (2014). Do Natural Resource Revenues Hinder Financial Development? The Role of Political Institutions. *World Development*, *57*, 101–113. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2013.12.003

Bird, R. M., & Tarasov, A. V. (2004). Closing The Gap: Fiscal Imbalances and Intergovernmental Transfers in Developed Federations. *Environment and Planning C: Government and Policy*, *22*(1), 77–102. https://doi.org/10.1068/c0328

Eyraud, L., & Lusinyan, L. (2013). Vertical Fiscal Imbalances And Fiscal Performance In Advanced Economies. *Journal of Monetary Economics*, *60*(5), 571–587. https://doi.org/10.1016/j.jmoneco.2013.04.012

Fahriza, M., & Riswati, R. (2023). Analisis Pendapatan Asli Daerah untuk Mengukur Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Bandung Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, *10*(2), 158–172. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3732

Feng, Z., & Li, Y. (2024). Natural Resource Curse And Fiscal Decentralization: Exploring The Mediating Role Of Green Innovations And Market Regulations In G-20 Economies. *Resources Policy*, *89*, 104556. https://doi.org/10.1016/j.resourpol.2023.104556

Hidayat, B. A., Apriliana, T., Faturohim, A., Wahyuni, R. N. T., Landekumandang, F., Judijanto, L., Rahmawati, T., Hamzah, A., Yolanda, Y., & Saksono, H. (2024). Local Government Development Policy: Natural Resource Revenue Sharing and Economic Growth in Indonesia. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, *8*(15), 1–19. https://doi.org/10.24294/jipd10375

Indahyani, R., & Marbun, R. M. W. (2020). Analisis Komparatif Pertumbuhan Pendapatan Daerah di Lima Wilayah Adat Tahun 2012-2018 Provinsi Papua. *Jurnal Kajian Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, *7*(2), 1–16. https://doi.org/10.56076/jkesp.v7i2.2174

Lazuardi, D. Z. (2013). Analisis Ketidakseimbangan Fiskal Vertikal Dan Horizontal Di Jawa Timur Periode 2007-2012 (Studi Kasus 38 Kabupaten/Kota). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, *1*(2), 1–17. https://jimfeb.ub.ac.id/index.php/jimfeb/article/view/657

Lessmann, C. (2012). Regional Inequality And Decentralization: An Empirical Analysis. *Environment and Planning A: Economy and Space*, *44*(6), 1363–1388. https://doi.org/10.1068/a44267

Mumbunan, S., Ring, I., & Lenk, T. (2012). *Ecological Fiscal Transfers at the Provincial Level in Indonesia*. UFZ Discussion Paper. https://www.researchgate.net/publication/239811364_Ecological_fiscal_transfers_at_the_provincial_level_in_Indonesia

Nalien, E. M. (2020). *Keuangan Negara Dan Daerah Komponen Transfer Ke Daerah Dan Dana Desa*. Bandung : Cendekia Press. http://eprints.ipdn.ac.id/id/eprint/5830

Runjung, R. M. R. P. K., Primastuti, A., & Riswati, R. (2022). Analisis Tingkat Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Dan Pertumbuhan Keuangan Pemerintah Kota Bandung Provinsi Jawa Barat. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, *9*(2), 96–111. https://doi.org/10.33701/jekp.v9i2.2822

Sinurat, M., Sudrajat, I., & Komedi. (2023). Kemandirian Keuangan Daerah Kota Pekanbaru. *JEKP (Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Publik)*, *10*(2), 216–232. https://doi.org/10.33701/jekp.v10i2.3922

Williamson, J. G. (1965). Regional Inequality and the Process of National Development: A Description of the Patterns. *Economic Development and Cultural Change*, *13*(4), 1–84. http://www.jstor.org/stable/1152097